

## **Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang**

**Kristyan Dwijosusilo<sup>1)</sup>, Siti Shafiyah<sup>2)</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

<sup>1)</sup> [krisservitalen@gmail.com](mailto:krisservitalen@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [chadri86@gmail.com](mailto:chadri86@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat Desa Klobur dalam pembangunan infrastruktur yang alokasi anggarannya bersumber dari dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2). Partisipasi dalam pelaksanaan. 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. 4). Partisipasi dalam evaluasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), serta anggota masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1).Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan) pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi karena sebagian besar warga yang diundang hadir mengikuti rapat Musrenbangdes. Mereka yang hadir dalam rapat Musyawarah Desa tersebut banyak mengajukan masukan baik berupa usul, pendapat maupun saran. 2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, dibuktikan dengan tingginya partisipasi mereka dalam membantu proses pelaksanaan pembangunan. 3). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi. Masyarakat dengan antusiasnya menggunakan atau memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya. 4). Partisipasi dalam mengevaluasi hasil semua kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, karena masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Tim Ahli dari kabupaten serta aparatur Desa. Penelitian ini merekomendasikan supaya Pemanfaatan Dana Desa (DD) hendaknya tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik, sebaiknya dapat menyentuh semua sektor yang dibutuhkan masyarakat desa. Selain itu perlu adanya monitoring yang kompeten dari pemerintah desa kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DD serta perlu adanya pelatihan atau semacamnya terhadap masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan DD.

**Kata Kunci : Partisipasi, Pembangunan Infrastruktur, Dana Desa**

### ***Abstract***

*This study aims to describe the level of participation of the Klobur Village community in infrastructure development whose budget allocations come from village funds. This study used descriptive qualitative method. The focus of this research is 1) Participation in decision making. 2). Participation in implementation. 3) Participation in the utilization of the results.*

4). *Participation in evaluations. The informants in this study were the Village Head, Village Consultative Body (BPD), Village Community Institutions (LMD), Village Financial Management Technical Implementers (PTKPD), and community members. The results of this study indicate that 1). Community participation in decision-making (planning) for infrastructure development in their village is high because most of the residents invited to attend the Musrenbangdes meeting. Those who attended the Village Deliberative Meeting submitted many inputs in the form of suggestions, opinions and suggestions. 2). Community participation in the implementation of infrastructure development in his village is very high, as evidenced by their high participation in assisting the development implementation process. 3). Community participation in utilizing the results of infrastructure development in their village is high. The community enthusiastically uses or utilizes the results of each activity according to its function. 4). Participation in evaluating the results of all infrastructure development activities in his village is very high, because the community carries out monitoring and evaluation together with the Expert Team from the district and village officials. This study recommends that the Utilization of Village Funds (DD) should not only be focused on physical development, it should be able to touch all sectors needed by rural communities. In addition, there needs to be competent monitoring from the village government to the people involved in DD management and there needs to be training or the like for the people involved in the use of DD.*

**Keywords: Participation, Infrastructure Development, Village Fund**

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, ada kondisi di beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintahan desa cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan

dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program

yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Program Dana Desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa-nya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.” Namun kewenangan ini juga merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola Dana Desa dan mempertanggungjawabkannya dengan benar.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Dana Desa (DD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Partisipasi dari setiap warga desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah

dan pontesi yang ada di masyarakat. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dana Desa di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam peruntukan dan besarnya dibagi empat Bidang, yaitu Pemerintahan 10 %, Pembangunan 80%, Pemberdayaan 10% dan Pembinaan 5 %. Penyerapan ADD dan DD di desa Klobur terserap 100 %. Dari 80% alokasi dana desa yang digunakan untuk maka sebagian diantaranya digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik. Dengan demikian Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur telah memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sehingga tersedia data untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat yang kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya yang didanai dengan dana desa.

Dengan demikian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat partisipasi warga desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan infrastruktur di desanya yang alokasi anggarannya bersumber dari dana desa ?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Partisipasi**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis partisipasi diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan

pada pencapaian tujuan dan mengambil bagian dalam tanggung jawab. Menurut Keith Davis (1975:136) maka ada tiga ide dalam partisipasi yakni 1). Keterlibatan mental dan emosional, lebih dari sekedar aktivitas otot. Pribadi seseorang yang terlibat lebih daripada keahliannya. 2). Partisipasi memotivasi seseorang untuk memberi sumbangan pada situasi. Mereka memberi kesempatan untuk memperoleh sumber-sumber yang mereka miliki dari inisiatif dan kreatifitas kearah pencapaian tujuan organisasi. 3). Partisipasi melibatkan orang untuk menerima tanggung jawab pada kegiatan-kegiatan kelompok mereka.

Bryant et.all (1987:88) menyatakan partisipasi sebagai peran serta yang didalamnya tersirat makna dan integritas pada keseluruhan proyek. Beliau menjabarkan bahwa a). Peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. b) Peran serta perhatian yang mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat yang semakin baik. c). Peran serta adalah kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: a). Partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b). Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila

individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

Sedangkan Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat dan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.
- c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi

kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d. Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan suatu program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 1994:154): 1). Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2). Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3). Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran (Ndraha, 1990:109). Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat

untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya

## **2. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan menurut Siagian (2001:2-3) adalah:” suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan tugas.” Sedangkan menurut Tjokromidjojo (2000:7) yang dimaksud dengan pembangunan adalah keseluruhan dari proses kegiatan pengendalian usaha untuk merealisasikan pertumbuhan yang berencana kearah modernisasi serta kemajuan dalam bidang sosial ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial/masyarakat yang berencana kearah kemajuan yang menyangkut berbagai segi kehidupan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana

dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Infrastruktur kerap dipahami oleh kaum awam sebagai sarana dan prasarana, secara teoritis pengertian infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Dari pandangan Kodoatie tersebut bisa dipahami pembangunan desa akan mudah tercapai bilamana telah terpenuhinya infrastruktur di pedesaan sebagai media pendukung dari upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan desa.

Lebih lanjut Kodoatie (2005) mengungkapkan infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur

yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Ketersediaan infrastruktur di desa akan sangat membantu dalam upaya pembangunan desa, dengan demikian maka menjadi penting terlebih dahulu menyediakan infrastruktur yang memadai di pedesaan sebelum melangkah pada berbagai program pembangunan selanjutnya.

Grigg (1988) mengungkapkan berdasarkan jenisnya, infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai berikut :

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air (treatment plant),
- b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang,
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi,
- f. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,
- g. Sistem transit publik,
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,
- i. Fasilitas gas alam,
- j. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,
- k. Fasilitas perumahan publik,
- l. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
- m. Fasilitas komunikasi.

### **3. Dana Desa**

Dana Desa (DD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014).

Dana Desa (DD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi), dan Bendahara. Tugas dari Sekretaris Desa adalah menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APB Desa; melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa; dan melakukan verifikasi terhadap rencana Belanja dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan Bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan partisipasi pembangunan sebagai berikut :

- a. Yudiansyah Eka Saputra dalam penelitian tahun 2018 dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Dana Desa di kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung melalui penggunaan dana desa secara keseluruhan masih dalam tingkat non partisipasi. Masyarakat yang tergolong masyarakat kurang mampu berada pada kriteria manipulasi, sedangkan masyarakat yang tergolong mampu sebaagian besar berada pada kriteria terapi.
- b. Stephanus Henry K dalam penelitian tahun 2018 dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dikelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Sebrang Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif.

Hal demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

- c. Martiana Dwi Rahayu dalam penelitian tahun 2017 dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ini secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan.

### **C. METODOLOGI**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana ia berupaya menggambarkan dan menjekaskan, mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi di lapangan atau tempat yang akan di teliti. Menurut Sugiyono(2012:11) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indevendent) yang di tanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel lainnya”. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:4) jenis penelitian diskriptif kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dengan alasan karena desa tersebut telah memanfaatkan dana desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa sehingga tersedia data yang bisa diakses peneliti. Selain itu oleh karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya maka penelitian tentang partisipasi sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan didesanya di masa mendatang.

Fokus penelitian ini adalah tahap-tahap partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang terdiri dari 4 macam, yaitu:

- a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat dan berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya
- c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas.
- d. Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD), dari unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTKPD), dan dari unsur warga biasa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012: 241) dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya berlangsung yaitu membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun (Prastowo, 2012: 242).
- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang

telah difahami tersebut (Sugiyono, 2011: 249).

- c. Untuk langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari arti fenomena, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **1. Pembangunan Infrastruktur Desa Klobur**

Desa Klobur adalah salah satu desa yang terletak dikecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Desa Klobur adalah 298 HA. Dengan lahan produktif 87,430 ha/m<sup>2</sup>. Luas wilayah desa Klobur adalah 298 HA, yang terdiri dari tanah sawah 87,430 ha/m<sup>2</sup>, pemukiman 22,59 ha/m<sup>2</sup>, pekarangan 5,605 ha/m<sup>2</sup>, Kas Desa atau sawah desa 21,47 Ha, lapangan Olah Raga 0,84 Ha, perkantoran pemerintah 0,07 Ha, bangunan sekolah 0,12 Ha, pertokoan atau kios 0,08 Ha, jalan 8,87 Ha, dan usaha perikanan 0,02 Ha. Wilayah Administrasi desa Klobur terdiri dari: 5 Dusun/Kampung, yaitu; Dusun Bantelan, Dusun Manduyan, Dusun Sembutih, Dusun Taming dan Dusun Kasiran/Bek Jengguk.

Pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik desa Klobur kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Jawa Timur, yang alokasi anggarannya bersumber dari dana desa sebagai berikut

- a. Pembangunan Rabat Beton.  
Pembangunan rabat beton jalur utama penunjang perekonomian masyarakat khususnya yang berdomisili di dusun

sembutih desa klobur kecamatan sreseh kabupaten sampang

- b. Pembangunan Drainase Dusun Taming Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang
- c. Pengaspalan jalan utama penghubung Dusun Bekjangguk dengan Dusun Taming, serta menjadi penghubung antar Desa Klobur dengan Desa Labang.
- d. Pembangunan Penampungan air untuk masyarakat Khususnya yang berdomisili di Dusun Bantelan Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
- e. Pembangunan Lapangan Futsal di Dusun Sembutih.
- f. Pembangunan Plengsengan untuk kelancaran transportasi darat serta penguatan struktur jalan penghubung Dusun Sembutih Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

##### **2. Analisa**

Setelah melalui wawancara dari para informan dan setelah hasil wawancara di analisis sebagaimana tersusun dalam metodologi maka berikut ini disajikan hasil analisis dari diskripsi partisipasi warga desa Klobur kecamatan Sreseh terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya, sebagai berikut :

###### **a. Partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan.**

Perencanaan dalam pembangunan desa di Desa Klobur dalam pemanfaatan Dana Desa (DD) yang melibatkan masyarakat desa melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat Dusun. Masyarakat mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan dan selanjutnya usulan tersebut dibawa oleh perwakilan dusun ke tingkat Musyawarah Desa. Dengan kata lain perencanaan

pembangunan di Desa Klobur terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah tingkat Dusun (Musdus), setelah itu dalam Musrenbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa).. Musrenbangdes dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Kapolsek, Danramil, para Kepala Desa beserta Sekretaris Deas, Perangkat desa, Tim Pelaksana Teknis, dan Badan Permusyawaratan Desa. Perencanaan tersebut melibatkan juga masyarakat karena masyarakatlah yang mengetahui situasi dan kondisi desa Klobur. Masyarakat tidak sekedar hadir dalam rapat sampai selesai tetapi juga terlibat dalam bentuk menyampaikan pendapat, ide dan masukan. Masyarakat sangat antusias dalam rapat tersebut terbukti dari yang diundang yang tidak hadir hanya 5% dan itupun karena yang bersangkutan ijin berhalangan. Diantara yang hadir ada yang serius tetapi ada juga yang santai. Tiap dusun diminta untuk memberi masukan berupa pendapat, saran dan usul pembangunan. Dalam Musrenbangdes masyarakat mengusulkan solusi atas masalah yang ditemukan, kemudian ditanggapi dan dimusyawarahkan. Masukan tersebut selanjutnya di bahas dan dimusyawarahkan lalu diambil keputusan. Selain itu keputusan juga didasarkan pada prioritas pembangunan desa.

#### **b. Partisipasi dalam pelaksanaan**

Masyarakat memberikan masukan atau pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa. Masyarakat mengajukan usulan/berpendapat dengan suka rela, masyarakat desa juga ada yang memberikan sekedar makanan, memberikan bantuan sarana dan prasarana/peralatan, namun juga ada yang memberi bantuan finansial seikhlasnya, tapi terkadang pihak pelaksana juga

memberikan sekedar uang rokok buat mereka. Bantuan masyarakat murni tidak ada motif lain karena masyarakat menganggap kegiatan pembangunan itu adalah milik dan untuk kepentingan bersama warga desanya sendiri. Masyarakat dengan suka rela membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena masyarakat ingin kegiatan pembangunan segera selesai dan terlihat hasilnya. Masyarakat juga ingin kegiatannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diprioritaskan. Masyarakat sadar, bahwa setiap kegiatan adalah demi kebaikan mereka sendiri, walaupun pelaksana terkadang memberikan mereka imbalan sekedarnya.

#### **c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil**

Dengan adanya beberapa kegiatan/proyek pembangunan yang menggunakan dana desa maka masyarakat Desa Klobur sudah bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Hasil-hasil pembangunan fisik di desa Klobur sangat berarti dan terasa manfaatnya. Karena Pemanfaatannya dengan menggunakannya sehari-hari. Manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari adanya kegiatan pembangunan beraneka ragam. Masyarakat memanfaatkan hasil setiap kegiatan dengan cara menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan pembangunan desa, seperti adanya pembangunan Drainase memperlancar pengairan sawah dan mengurangi genangan air diwaktu musim hujan, perbaikan jalan penghubung antar Dusun meningkatkan kenyamanan dan kelancaran kegiatan transportasi di desa Klobur. Lapangan Futsal dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan lomba atau

pertandingan antar warga, antar dusun bahkan pertandingan olah raga antar desa. Jika ada hasil kegiatan pembangunan fisik yang membutuhkan perbaikan atau perawatan maka warga melaporkan kepihak desa. Namun demikian ada juga masyarakat ada yang langsung menanggapinya dengan melakukan tindakan yang semestinya/dibutuhkan. Respon positif atas kebutuhan perawatan atau perbaikan terhadap hasil pembangunan fisik di desa Klobur maka dengan kesadaran yang tinggi masyarakat melakukan kegiatan secara mandiri dan bergotong-royong.

#### **d. Partisipasi dalam evaluasi**

Yang melakukan pemantauan dan evaluasi adalah Tim Ahli dari kabupaten serta aparatur Desa Klobur bersama dengan ketua Pelaksana Program Pembangunan Desa. Namun masyarakat juga ikut terlibat didalam pemantauan dan evaluasi, sehingga masyarakat mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan desa. Masukan warga tentang evaluasi dalam terhadap kegiatan dan hasil pembanguan fisik di desa Klobur bisa dilakukan secara formal maupun informal kepada kepala desa atau pihak-pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pembangunan. Masukan warga tentang evaluasi dalam terhadap kegiatan dan hasil pembanguan fisik di desa Klobur tidak semuanya bisa diakomodir karena harus melalui prosedur yang telah ditetapkan bersama. Ada evaluasi yang langsung ditanggapi atau ada juga yang perlu beberapa waktu untu memberi tanggapan. Dengan adanya evaluasi dari masyarakat maka pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa Klobur menjadi lebih transparan. Tersedianya prosedur evaluasi membuat

masyarakat desa Klobur bisa merasa senang hati dan menerima karena adanya respon yang cepat dari pihak Pelaksana Pembangunan dan Aparat Desa Klobur.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Kesimpulan
  - a. Partisipasi masyarakat desa Klobur dalam pengambilan keputusan (perencanaan) pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi, karena sebagian besar warga yang diundang hadir mengikuti rapat Musrenbangdes. Mereka yang hadir dalam rapat Musyawarah Desa tersebut banyak mengajukan masukan baik berupa usul, pendapat maupun saran yang semuanya merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan desanya. Masukan tersebut ditanggapi, dimusyawarahkan, dan dijadikan sebagai keputusan bersama.
  - b. Partisipasi masyarakat Klobur dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, dibuktikan dengan tingginya partisipasi mereka dalam membantu proses kegiatan pembangunan. Bantuan yang mereka berikan berbentuk tenaga, pemikiran, dan konsumsi. Bantuan secara finansial bisa dikatakan tidak ada, karena sangat minim. Masyarakat membantu semua kegiatan dengan suka rela tanpa motif lain.
  - c. Partisipasi masyarakat Klobur dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi. Masyarakat dengan antusiasnya menggunakan/memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya. Masyarakat juga

berpartisipasi dengan menjaga dan memelihara hasil kegiatan dengan melakukan tindakan perbaikan atau pemeliharaan.

- d. Partisipasi dalam mengevaluasi hasil semua kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, karena masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Tim Ahli dari kabupaten serta aparat Desa Klobur bersama dengan ketua Pelaksana Program Pembangunan Desa. sehingga masyarakat mengetahui apa saja kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan pembangunan yang ada didesanya. Pada tahap evaluasi ini, masyarakat bisa memberikan saran dan tentunya dengan prosedur yang ada.
2. Rekomendasi
    - a. Pemanfaatan DD hendaknya tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik, sebaiknya dapat menyentuh semua sektor yang dibutuhkan masyarakat desa.
    - b. Dalam pemanfaatan dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaksanaannya harus transparan disemua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat.
    - c. Perlu adanya monitoring/pengawasan yang kompeten dari pemerintah desa kepada Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DD.
    - d. Perlu adanya pelatihan atau semacamnya terhadap masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan DD.
    - e. Meningkatkan nominal anggaran DD dari yang sudah terealisasi, mengingat adanya DD sangat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan.

## REFERENSI

- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Corraile Bryant dan Louis G. White , (1987) *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokokpokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Grigg, N. (1988), *Infrastructure Engineering and Management*, John Wiley & Sons.
- Keith Davis, (1975) *Human Behaviour at Work, Human Relations and Organization Behaviour*, Mc.Graw-Hill, Inc, New York, Fourt Edition, Page 136
- Kodoatie, Robert J. "Pengantar manajemen infrastruktur / Robert J. Kodoatie" (2005) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, j, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Ndraha, T. (1990). *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Siagian, (2001), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugiyah. (2010). Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates. Tesis. PPs UNY. Kabupaten Kulon Progo.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Tjokroamidjojo. (2000).Perencanaan Pembangunan, Masagung, Jakarta
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733.